

## RESUME RAPAT

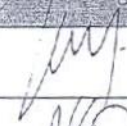
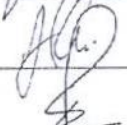

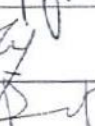
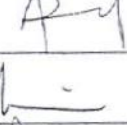
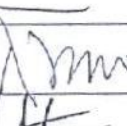
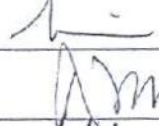
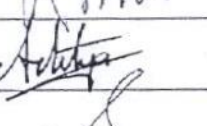
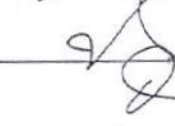
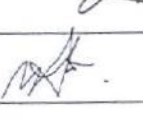
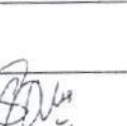
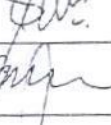
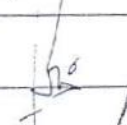
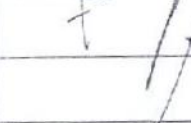
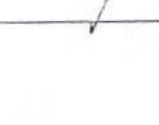

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya  
Acara : Rapat Koordinasi membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 45 Surabaya

### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa penghuni rumah di jalan jimerto no 45 Surabaya ( dihadiri oleh Bp. Bambang selaku keponakan dari Almh. Hj. A. Moerwati) menyerahkan data/dokumen :
  - fotocopi SHM No 326/ Kelurahan Ketabang;
  - fotocopi akta turunan surat kuasa no.1 tanggal 19 Juni 2013 oleh Notaris Anang K. Hariyadi;
  - fotocopi surat permohonan pencabutan pemblokiran hak milik no 326 kelurahan ketabang kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada bulan agustus 2013;
  - fotocopi surat keterangan untuk permohonan ijin untuk rumah tempat tinggal ;
  - fotocopi SKRK no 653/2459/436.6.2/2013;
  - fotocopi IMB;
  - fotocopi surat keterangan pendaftaran tanah;
2. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya bersama sama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, pemilik rumah no 45 ( dihadiri oleh Bp. Bambang), Bp. Hidayat, Bp. Ruslan dari Kemen PU, DPBT telah melakukan klarifikasi dokumen-dokumen terkait Jimerto No. 45 Surabaya;
3. Bahwa kesimpulan sementara :berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU Nomor 187/KPTS/1997 tentang Penetapan Harga Rumah dan / Tanah NVV di Surabaya, dalam lampirannya menjelaskan bahwa Jalan Jimerto no 45 hanya bangunan saja yang dijual, untuk tanah bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menjelaskan pada saat proses permohonan sertifikat, penerbitan surat keputusan pemberian hak dikeluarkan oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur sehingga untuk penyelesaian masalah yang dimaksud hanya kewenangan BPN RI / Kementerian ATR;
5. Bahwa DPBT Kota Surabaya menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya tidak menemukan data yang berkaitan dengan rekomendasi / surat persetujuan / surat pelepasan hak dari Pemerintah Kota Surabaya atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jimerto No. 45;
6. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya berpendapat dari dokumen-dokumen yang ada dari awal hingga terbitnya masih terdapat kekurangan dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari proses penerbitan SHM No. 326/Kel. Ketabang dimaksud.

## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2017  
 Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya  
 Acara : Rapat Koordinasi membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 53 Surabaya

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Jonatan Martus	Kejaksaan Negeri Sby	
2.	Hanafi Rachman	_____	
3.	Dalupi S	_____	
4.	Sidharta	_____	
5.	Irfan N	_____	
6.	Teddy I	_____	
7.	M. Hidayat	PU PERA	
8.	Ruslan Rachman	PU Pd	
9.	Aditya Guwanda	Kemen. PUPR	
10.	Bowang A	rapat	
11.	Dina A	_____	
12.	Muhammad	Bag. Hukum Pembat	
13.			
14.	Betty Helena	Kement. PUPERA	
15.	Budi Santoso	Pemilik Rumah	
16.	Ir. Bambang Sugianto	Pemilik Rumah	
17.	Budi Susanto	Santah Sby II	
18.			